

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesisir di Desa Kuala Bubon

Noka Omalia*

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Indonesia

*Coressponding author: nokaomalia281@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [23 Desember 2024]

Revisi [30 Desember 2024]

Diterbitkan [30 Januari 2025]

KATA KUNCI

Optimalisasi; Pemerintah Desa; Partisipasi; Pemberdayaan; Ekonomi Pesisir

KEYWORDS

Optimization; Village Government; Community Participation; Empowerment; Coastal Economy

This work is licensed under a:



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi dari peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perekonomian pesisir di Desa Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Provinsi Aceh. *Puposive sampling* menjadi teknik penentuan narasumber dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Terdapat empat tahapan analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan sebagai *fasilitator, katalisator, dinamisator* dan *regulator* dalam proses pemberdayaan ekonomi pesisir, namun akan tetapi peranan tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan perekonomian pesisir seperti modal usaha dan teknologi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih belum optimal meskipun masyarakat telah memenuhi konteks dari kesempatan dalam partisipasi, keinginan dan kemauan dalam berpartisipasi, serta kemampuan untuk berpartisipasi, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap program pemberdayaan, peranan dari pemerintah desa serta partisipasi masyarakat untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesisir.

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of optimization of the role of village government and community participation in empowering the coastal economy in Kuala Bubon Village, Samatiga District, Aceh Province. *Puposive sampling* is a technique to determine the sources in the research conducted. This research uses a qualitative descriptive analysis approach. Data collection methods were conducted through interviews, documentation, and direct observation. There are four stages of data analysis, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the research findings, it shows that the government has played a role as a *facilitator, catalyst, dynamist* and *regulator* in the process of empowering the coastal economy, but this role is not yet optimal because there are still obstacles faced in the process of empowering the coastal economy, such as business capital and technology. Apart from that, community participation is still not optimal even though the community has fulfilled the context of opportunities for participation, desire and willingness to participate, as well as the ability to participate, this is due to the low level of community participation in the empowerment process. Therefore, an evaluation of the empowerment program, the role of village government and community participation is needed to achieve successful coastal economic empowerment.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara, menempati peringkat ke-15 di dunia, keunikan geografisnya begitu memukau, yang dimana luas lautan yang mendominasi hingga 5,8 juta km² atau sepertiga dari keseluruhan wilayah (Adellia et al., 2024). Dengan kondisi ini, Indonesia pantas menyandang julukan "Negara Maritim", karena lebih dari 60% wilayahnya adalah lautan yang kaya akan potensi alamnya. Selain dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa berkat keindahan alamnya yang mempesona, Indonesia juga diberkahi oleh sumber daya alam yang kaya, terkhususnya pada bidang perikanan (Asropi et al., 2019). Potensi luar biasa ini tersebar dari ujung Kota Sabang sampai ujung timur di Merauke, memberikan kekayaan tak ternilai yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir (Ardiyanti, 2018).

Di berbagai wilayah pesisir, masyarakat telah lama menggantungkan hidup mereka pada potensi laut. Salah satu contohnya adalah Desa Kuala Bubon yang terletak di Kecamatan Samatiga. Desa ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi juga mencerminkan bagaimana laut menjadi jantung kehidupan bagi penduduknya. Kehidupan di Kuala Bubon begitu erat dengan laut, para nelayan memulai harinya di bawah sinar matahari pagi yang menyapa perairan biru, mencari tangkapan ikan yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Hasil tangkapan ini tidak hanya menghidupi keluarga mereka tetapi juga berkontribusi pada perekonomian daerah, dengan demikian Desa Kuala Bubon telah menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang tak tergantikan.

Namun, keberlimpahan ini juga menuntut pengelolaan yang bijaksana agar laut tetap menjadi berkah bukan beban bagi generasi mendatang. Desa yang memiliki luas wilayah mencapai 0,18 km² ini berhadapan langsung dengan bibir pantai. Karena letak geografis tersebutlah yang memengaruhi mata pencaharian masyarakatnya, hampir sebagian besar penduduk desa berprofesi di sektor perikanan dan kelautan, seperti nelayan, pedagang ikan keliling, pengolah ikan asin, dan sebagainya. Hanya sebagian kecil saja yang bekerja di luar dari sektor perikanan dan kelautan. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Kuala Bubon disebut juga sebagai masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Barat.

Masyarakat Pesisir merupakan perkumpulan individu yang menetap di kawasan pesisir dengan sumber perekonomian mereka bergantung pada potensi dari sumber daya laut atau pesisir, melalui berbagai aktivitas penangkapan atau perikanan budidaya (Rahmanto & Purwaningsih, 2015). Menjadi masyarakat pesisir pada dasarnya bekerja tergantung pada hasil laut bukan merupakan hal yang mudah bagi mereka. Banyak hambatan dan tantangan yang mereka hadapi selama bekerja, sehingga masyarakat masih sering mengalami permasalahan terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Kuala Bubon saat ini.

Tentunya dibutuhkan sebuah inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, diantaranya ialah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana prasarana, teknologi bahkan modal usaha. Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan individu maupun kelompok dalam pengelolaan kehidupan yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat luas terhadap masyarakat (Nuraini, 2016). Sedangkan menurut (Yusuf, 2017) pemberdayaan merupakan sebuah proses memberikan kekuatan, pengetahuan serta keterampilan terhadap suatu kelompok untuk mengubah jalan sosial dan ekonomi yang mereka miliki agar menjadi lebih baik. Memberdayakan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mencapai peningkatan harkat serta martabat dari kalangan

masyarakat menengah kebawah dengan segala macam keterbatasan yang mereka miliki, serta belum mampu melepaskan diri dari berbagai hal, seperti kondisi kesenjangan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbelakangan (Hayat & Bunyamin, 2021).

Sedangkan ekonomi pesisir ialah suatu sistem ekonomi yang berkembang di kawasan pesisir yang mencakup pada wilayah perairan maupun daratan pantai, semua itu merupakan bagian dari ekonomi pesisir (Widiyanto, 2016), adapula (Sutrisno, 2018) berpendapat bahwasanya ekonomi pesisir merupakan sektor perekonomian yang melibatkan interaksi antara manusia dengan segala bentuk sumber daya alam di lingkungan pesisir. Maka dapat diartikan bahwa pemberdayaan ekonomi pesisir merupakan upaya yang dilakukan dalam pengembangan kemampuan dalam pengelolaan perekonomian pada wilayah perairan maupun pantai kawasan pesisir, proses tersebut berupa pemberian kekuatan, pengetahuan dan keterampilan agar memperoleh hasil yang lebih baik.

Sebuah pemberdayaan dibutuhkan perencanaan yang menyeluruh baik dari segi tahapan, target yang ingin dicapai, program yang ingin dilaksanakan, serta manfaat yang akan diterima nantinya. Selain itu, terdapat pula unsur-unsur dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. Menurut Darwanto (2007) dalam Bahua (2015) menjelaskan bahwasanya terdapat empat unsur dalam pemberdayaan masyarakat, yang terdiri atas : *Pertama*, inklusi dan partisipasi masyarakat; *kedua*, akses pada informasi antara pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat; *ketiga*, kapasitas organisasi lokal yang diartikan sebagai kemampuan masyarakat bekerja sama, dan mengorganisasikan perorangan atau kelompok, serta memobilisasi sumber daya yang ada dalam menyelesaikan sebuah masalah bersama; *keempat*, profesionalitas pelaku pemberdayaan baik aparat pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (Bahua, 2015). Pemberdayaan yang diimplementasikan dapat berupa peningkatan sumber daya manusia dengan mengembangkan potensi yang dimiliki (Febriyanto et al., 2024).

Dari unsur-unsur tersebut, terdapat pula dua peran penting dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, yaitu pihak pemerintah desa dan pihak masyarakat desa. Pemerintah desa dapat disebut sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan publik disuatu daerah (Sulaiman, 2018). Setelah adanya desentralisasi serta otonomi desa, saat ini pemerintah desa memiliki kewenangan lebih terhadap pengambilan keputusan dan tata kelola pembangunan dalam desa, termasuk dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi (Rohman, 2019), dalam pemberdayaan ekonomi pesisir pemerintah desa memiliki fungsi penting sebagai penanggungjawab maupun pengelola sumber daya, baik pada sumber daya alam, manusia, serta teknologi (Mardikanto, 2017).

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah pemberdayaan dan pembangunan desa (Djahmiq & Salahudin, 2022), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 127 Ayat (1) dikatakan bahwa pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa, dan Pasal 128 Ayat (1) bahwasanya pemerintah melaksanakan proses pemberdayaan desa dengan melalui proses pendampingan secara berlapis sesuai kepentingan masyarakat.

Menurut Arif dalam Nurdin (2014) dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah terhadap pembinaan masyarakat dapat dibagi menjadi 4 peranan yaitu : *Pertama*, sebagai *regulator* yang berarti pemerintah desa berperan sebagai pengarah atau memberikan pedoman secara mendasar kepada publik sebagai bagian dari perangkat untuk mengatur

sebuah kegiatan implementasi pemberdayaan; *kedua*, sebagai *dinamisator* atau dapat diartikan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan; *ketiga*, sebagai *fasilisator* yang artinya sebagai pemberi kenyamanan dan fasilitas dalam pemberdayaan; *keempat*, sebagai *katalisator* yaitu pemerintah menjadi sosok agen kepada masyarakat untuk mempertinggi laju perkembangan potensi desa yang kemudian dapat menjadi investasi sosial untuk meningkatkan partisipasi (Nurdin et al., 2014). Maka dari itu pemerintah desa memiliki kewajiban dalam merumuskan berbagai program yang sesuai agar pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (Azis, 2022).

Selain peran pemerintah, ada pula unsur lain yang cukup penting dalam sebuah pemberdayaan masyarakat yakni partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai bentuk keterlibatan aktif dari suatu individu maupun kelompok terhadap sebuah kegiatan yang terkait pengambilan keputusan tingkat lokal, partisipasi masyarakat tergolong penting karena menjadi bagian dari terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari suatu wilayah (Mannayong et al., 2024). Melalui partisipasi masyarakat, maka pemerintah akan lebih peka dan paham terhadap tantangan maupun dasar dari prioritas mereka sendiri (Husna, 2016).

Partisipasi menurut Slamet (1985) dalam Handini (2019) terdapat tiga unsur pokok, yaitu: *Pertama*, terdapat kesempatan yang ditawarkan untuk masyarakat dalam berpartisipasi; *kedua*, memiliki kemauan serta keinginan masyarakat dalam berpartisipasi; *ketiga*, adanya kapasitas masyarakat dalam proses partisipasi (Handini et al., 2019). Partisipasi masyarakat amat diperlukan dalam kegiatan penentuan dan perencanaan program kegiatan atau dalam bentuk pengambilan sebuah keputusan (Kandati et al., 2019), sebab partisipasi dapat mendorong rasa dan nilai tanggungjawab masyarakat dalam menjalankan suatu kegiatan. Dari adanya optimalisasi peran pemerintah dan partisipasi masyarakat, maka kedua indikator tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Kuala Bubon. Berdasarkan konteks organisasi, optimalisasi dalam peran merupakan bentuk proses yang bersifat melibatkan pengembangan individu dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar dapat memaksimalkan peran setiap pihak dengan baik serta mampu dalam penyesuaian terhadap kebutuhan yang berubah setiap saat (Schein, 2018).

Sedangkan dalam bidang ekonomi, optimalisasi didefinisikan sebagai bentuk upaya memaksimalkan manfaat serta keuntungan dengan sebaik-baiknya serta meminimalisir pengeluaran dari segi biaya produksi dan distribusi (Mishra & Sharma, 2019), optimalisasi juga menajai langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan optimasi (Musthofa et al., 2024). Begitu pula yang diharapkan oleh Desa Kuala Bubon dengan adanya optimalisasi peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesisir di desa tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan dari masalah yakni bagaimana optimalisasi peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon?, dari rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana fungsi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon.

Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan bentuk pendekatan kualitatif berjenis penelitian deskriptif. Dalam menentukan narasumber informasi penelitian, penulis

menggunakan metode *puposive sampling* (Meilia & Safrida, 2022). Penelitian Kualitatif diartikan sebagai penelitian yang mampu mengungkapkan berbagai bentuk fenomena dalam masyarakat secara spesifik, penelitian tersebut baik dalam bentuk fenomena alam maupun fenomena sosial (Sukmadinata, 2017). Terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berupa teknik wawancara kepada narasumber, dokumentasi serta observasi (Arikunto, 2018). Setelah diperoleh data, maka penulis juga melakukan analisis data yang melalui beberapa tahapan, yakni pengumpulan data dari penelitian, lalu dilanjutkan pada tahapan reduksi data untuk menyeleksi data dengan tujuan agar data yang diperoleh akan berfokus kepada rumusan dan tujuan penelitian, lalu dilanjutkan dengan tahapan penyajian data dalam bentuk narasi serta tabel, dan diakhiri dengan kesimpulan dari hasil analisis data (Rijali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Bekerja sebagai nelayan sudah menjadi sebuah mata pencaharian yang turun temurun di Desa Kuala Bubon, dikarenakan potensi laut yang cukup melimpah tidak heran jika desa tersebut terkenal dengan hasil tangkap nelayannya. Mulai pada pukul 04.00 WIB masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri untuk berlayar menggunakan perahu masing-masing untuk mencari ikan, aktivitas yang mereka lakukan dilakukan secara rutin setiap harinya, hanya saja pada hari Jum'at sebagian besar nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas sementara untuk melaksanakan ibadah sholat jum'at, sebab mayoritas masyarakat desa merupakan seorang muslim dan berjenis kelamin laki-laki. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat nelayan bersifat gotong royong, mereka saling membantu satu sama lain dalam pekerjaan yang dilakukan, seperti yang terlihat dari dokumentasi penelitian pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Aktivitas Masyarakat Pesisir Desa Kuala Bubon

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Setelah tangkapan berhasil dibawa pulang, para masyarakat nelayan langsung mengelola hasil laut tersebut dengan berbagai cara tergantung jenis ikan dan keinginan para konsumen, sebagian jenis ikan yang dijual langsung kepada pemborong, namun ada pula jenis ikan yang harus diolah terlebih dahulu menjadi ikan kering atau ikan asin. Desa Kuala Bubon sendiri sudah terkenal akan hasil tangkap yang cukup melimpah, hal tersebut menguntungkan pihak masyarakat desa itu sendiri, sebab akses perdagangan ikan tangkapan menjadi cukup luas, bahkan ada beberapa jenis ikan diekspor langsung keluar daerah, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura.

Tak hanya dari segi perikanan saja, Desa Kuala Bubon juga terkenal akan wisata pantai yang cukup indah serta budaya lokal yang sangat menarik, sebab Desa Kuala Bubon juga terkenal akan hasil buah nipah, hutan mangrove dan kerajinan sulaman kasab, dengan demikian potensi yang dimiliki oleh Desa Kuala Bubon sudah cukup beragam dan tidak kalah dengan desa-desa yang lainnya.

Akan tetapi potensi yang dimiliki oleh Desa Kuala Bubon belum mampu mencegah terhindarnya dari kondisi perekonomian masyarakat yang rendah, sebab pekerjaan sebagai seorang nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, hal ini dikarenakan perolehan hasil tangkapan yang tidak dapat diprediksi jumlahnya, ditambah lagi kondisi alam dan musim yang sering kali menghambat proses penangkapan ikan, ketika cuaca sedang tidak mendukung maka aktifitas nelayan akan terhenti pada hari itu dan otomatis masyarakat nelayan tidak mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, dari kondisi tersebut mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil.

Maka dari itu potensi yang dimiliki harus diiringi dengan sebuah strategi dan inovasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti dengan adanya pemberdayaan ekonomi pesisir. Saat ini di Desa Kuala Bubon memang sudah terdapat beberapa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan tujuan peningkatan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon. Pemberdayaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rangkaian Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan	Bentuk Pemberdayaan	Tujuan
Pengelolaan hasil tangkap nelayan.	Fasilitas dan Modal Usaha	Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat seperti pembangunan TPI (Tempat Perdagangan Ikan), Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Modal Usaha, dan <i>Boat</i> kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sulaman Kasab	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan sulaman kasab serta sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
Ekowisata Nipah	Sarana dan Pendampingan	Membangun desa dengan ekowisata nipah sebagai upaya pembangunan kualitas ekonomi masyarakat.
Budidaya Mangrove	Pendidikan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem melalui budidaya mangrove sebagai upaya mencegah abrasi kawasan pesisir.

Sumber : Diolah dari wawancara narasumber penelitian

Berdasarkan keempat kegiatan diatas, unsur-unsur dari pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Bubon sudah mulai tercapai, baik dari segi inklusi dan partisipasi masyarakat desa, profesionalitas pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan, kapasitas organisasi dari pihak masyarakat, serta akses masyarakat dalam memperoleh suatu informasi. Namun akan tetapi dari keempat unsur tersebut, masih terdapat hambatan dan tantangan yang

mengakibatkan proses pemberdayaan ekonomi pesisir desa belum maksimal, dalam hal ini optimalisasi peran pemerintah desa dan tingkatan partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan serta strategi utama dalam penyelesaian dari hambatan dan tantangan pada proses pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon.

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesisir

Ketidakstabilan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir menjadi suatu hal yang patut diperhatikan oleh pemerintah desa, optimalisasi peranan dari pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan ekonomi pesisir. Berdasarkan pendapat Arif dalam (Nurdin et al., 2014) bahwasanya pemerintah desa sepatutnya menjalankan perannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pesisir, peranan tersebut dapat melalui empat fungsi yakni sebagai *regulator*, *dinamisator*, *fasiligator*, dan *katalisator*.

Berdasarkan keempat fungsi peranan, saat ini Desa Kuala Bubon dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir telah berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan peranannya, pemerintah desa telah melakukan pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana seperti ketersediaan transportasi yang mencapai lebih dari 20 *boat*, tempat sandaran kapal bagi nelayan, tempat perdagangan ikan (TPI), serta akses perdagangan hasil tangkapan ikan, didukung pula dengan perizinan terhadap pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata di sepanjang pantai Desa Kuala Bubon, maka dengan demikian peranan pemerintah desa sebagai *fasiligator* dalam pemberdayaan ekonomi pesisir telah diimplementasikan. Akan tetapi pemerintah Desa Kuala Bubon menganggap bahwasanya peranan mereka sebagai *fasiligator* belum optimal, hal ini dikarenakan pemerintah desa belum mampu menyediakan alat pendingin ikan bagi masyarakat Desa Kuala Bubon, sebab biaya operasi dan teknologi yang masih terbatas. Dampak dari tidak adanya pendingin ikan seringkali membuat masyarakat mengalami kerugian dan sulit mengatasi pengendalian mutu ikan segar pada musim tertentu.

Selain sebagai *fasiligator*, pemerintah desa juga memiliki peranan sebagai *dinamisator* atau penggerak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di lingkungan masyarakat pada proses pemberdayaan ekonomi pesisir, Desa Kuala Bubon saat ini telah melakukan pembentukan program pendidikan terkait edukasi penggunaan alat tangkap, budidaya dan ekowisata nipah.

Tujuan dari adanya program pendidikan tersebut ialah untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat pesisir sehingga bisa menciptakan inovasi dan mampu beradaptasi dalam kondisi sosial ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Desa Kuala Bubon juga berperan sebagai *regulator* bagi masyarakat yang dimana setiap pelaksanaan program pemerintah desa terus membangun komunikasi dengan masyarakat melalui musyawarah bersama melalui kegiatan Musrembang Desa.

Selaras dengan pendapat (Husna, 2016) bahwasanya masyarakat memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi pesisir sebab mereka yang akan lebih paham terhadap kondisi dan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, dalam hal ini peranan pemerintah sebagai *regulator* yang menegakkan peraturan dan kebijakan, serta membangun komunikasi antara kedua belah pihak. Selain itu, pemerintah Desa Kuala Bubon juga berupaya dalam merancang mitigasi bencana di Desa Kuala Bubon melalui budidaya hutan mangrove, hal tersebut juga merupakan bentuk bagian dari peranan sebagai *regulator* pada proses pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon.

Peranan terakhir dari pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi pesisir dapat berupa *katalisator*, maksudnya ialah pemerintah sepatutnya berperan sebagai sosok agen kepada masyarakat untuk mempercepat berkembangnya potensi desa yang selanjutnya bisa menjadi modal sosial dalam meningkatkan partisipasi, dalam hal ini kehadiran pemerintah desa sangatlah penting, sebab keberhasilan dari pemberdayaan ekonomi pesisir dibutuhkan pendampingan secara intensi oleh pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan keempat peranan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi pesisir, menunjukkan bahwasanya optimalisasi peranan pemerintah Desa Kuala Bubon masih perlu ditingkatkan lagi, diantaranya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang perlu dikembangkan kembali agar selaras dengan perkembangan teknologi. Selain itu dibutuhkan pula peningkatan dalam hal ketersediaan modal dan evaluasi program dengan tujuan agar capaian dari pemberdayaan ekonomi pesisir dapat berkembang sesuai tujuan keberhasilan.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Kuala Bubon

Proses pemberdayaan tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat desa, karena pemberdayaan akan berfokus pada masyarakat sebagai target pencapaian tujuan, dalam partisipasi masyarakat terdapat 3 unsur pokok yaitu terdapat kesempatan yang diperoleh masyarakat dalam berpartisipasi, kemudian terdapat keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi, serta adapula kemampuan atau potensi masyarakat tersebut dalam berpartisipasi (Handini et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian, Desa Kuala Bubon telah memenuhi ketiga konteks tersebut sebagai unsur partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi pesisir, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kuala Bubon telah memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi mulai dari keikutsertaan dalam Musrenbang Desa.

Pelaksanaan musyawarah tersebut pemerintah desa dan masyarakat menjalin musyawarah dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan program desa, selain itu masyarakat juga telah mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki melalui berbagai program yang dibentuk oleh pemerintah Desa Kuala Bubon, seperti mengikuti program pendampingan nelayan (Giawa & Darmansyah, 2022), pelatihan sulaman kasab, sosialisasi pemanfaatan alat tangkap ikan dengan bahan rumpon (Hasnita & Athaillah, 2022), pelatihan terkait pemanfaat budidaya mangrove sebagai bentuk mitigasi bencana, dan sebagainya.

Kemudian masyarakat desa juga memiliki kemauan untuk berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat sudah mulai sadar dan peka terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat di Desa Kuala Bubon, dengan potensi desa yang cukup besar masyarakat kini mulai memanfaatkan potensi ekonomi untuk menjadi mata pencaharian bagi masyarakat desa, seperti pembentukan objek wisata syariah (Amin, 2021). Pemberdayaan ekonomi pesisir tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Desa Kuala Bubon saja, banyak pihak yang lain yang ikut serta mengembangkan potensi Desa Kuala Bubon menjadi lebih optimal, salah satunya ialah unsur akademisi, yang dimana mahasiswa banyak mengunjungi desa tersebut untuk melakukan pendampingan serta penelitian terhadap permasalahan yang terjadi didesa, seperti pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Dokumentasi Proses Pemberdayaan

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Kuala Bubon

Selain kemauan dan kesempatan dalam berpartisipasi, Masyarakat juga harus memiliki kemampuan dalam berpartisipasi, maksudnya ialah masyarakat memiliki potensi untuk dilakukan perkembangan diri sesuai dengan minat serta keahlian yang mereka miliki. Berdasarkan penelitian, Desa Kuala Bubon telah membagi beberapa program yang berfokus pada unsur tertentu, seperti sulaman kasab yang dikelola oleh sebagian pihak perempuan dari desa tersebut yang memang memiliki keahlian maupun yang ingin mencoba belajar dalam mengembangkan budaya tradisional Aceh melalui sulaman kasab.

Selain itu adapula pendampingan dan sosialisasi inovasi dalam proses penangkapan ikan yang difokuskan kepada nelayan, dan adapula pelatihan dan bantuan modal usaha perikanan untuk masyarakat yang berfokus pada kewirausahaan. Maka dari itu, partisipasi masyarakat Desa Kuala Bubon sudah memenuhi ketiga unsur tersebut, namun hanya saja dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwasanya partisipasi masyarakat Desa Kuala Bubon dalam proses pemberdayaan ekonomi pesisir masih tergolong belum optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti berbagai proses pemberdayaan ekonomi pesisir, didukung pula dengan kondisi lingkungan yang mengharuskan para masyarakat nelayan menfokuskan diri terhadap pekerjaan utama mereka masing-masing, sehingga sebagian besar kegiatan program pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon tergolong tidak optimal.

3. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat

a) Optimalisasi Peran Pemerintah Desa

Optimalisasi peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kunci utama dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon, namun temuan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat masih belum optimal. Maka dari itu, dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon dibutuhkan upaya dan strategi yang tepat dalam optimalisasi peran pemerintah desa diantaranya ialah : Pertama) pembentukan regulasi yang inovatif dan adaptif sehingga pemberdayaan mampu memberikan dampak yang besar terhadap mereka yang diberdayakan; kedua) penyempurnaan fasilitas dan sarana prasarana pendukung demi terwujudnya keberhasilan dari suatu pemberdayaan ekonomi pesisir; ketiga) pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran produk masyarakat desa.

b) Optimalisasi Partisipasi Masyarakat

Selain peran pemerintah desa, optimalisasi juga perlu ditingkatkan pada partisipasi masyarakat Desa Kuala Bubon, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat diantaranya ialah : Pertama) penyebaran informasi terkait pemberdayaan ekonomi pesisir; kedua) peningkatan motivasi serta kesadaran masyarakat terkait manfaat yang akan diperoleh melalui partisipasi mereka dalam pemberdayaan yang dilaksanakan; ketiga) penyediaan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam proses pemberdayaan ekonomi pesisir seperti teknologi pembuatan produk, media pemasaran dan promosi produk serta; terakhir) adanya pembinaan atau penyuluhan melalui pihak yang memiliki profesionalitas dalam proses pemberdayaan ekonomi pesisir di Desa Kuala Bubon.

Kesimpulan

Desa Kuala Bubon memiliki beberapa jenis kegiatan diantaranya ialah pengelolaan hasil tangkap, pendampingan dan sosialisasi pengolahan produksi perikanan dan hasil tangkapan ikan, pendampingan ekowisata nipah, pengelolaan hutan mangrove, serta pelatihan sulaman kasab. Pemerintah Desa Kuala Bubon memiliki peranan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam empat bentuk peran yaitu sebagai *regulator*, *fasiligator*, *dinamisator*, dan *katalisator*. Selain itu, terdapat pula partisipasi masyarakat Desa Kuala Bubon yang mana ketiga unsur partisipasi berhasil tercapai oleh desa, mulai dari kemauan, kesempatan dan kemampuan dalam berpartisipasi. Akan tetapi baik dari segi peran pemerintah desa maupun partisipasi masyarakat masih tergolong belum optimal.

Maka dari itu, saran dari penulis dalam optimalisasi peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat di Desa Kuala Bubon dapat dilakukan melalui upaya dan strategi yang tepat seperti pembentukan regulasi inovatif dan adaptif, penyempurnaan fasilitas pendukung serta pemanfaatan teknologi digital. Selaras dengan upaya tersebut, optimalisasi partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi, peningkatan kesadaran dan motivasi, penyediaan fasilitas serta pembinaan secara profesional. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sumber dokumentasi yang digunakan, sehingga analisis yang diperoleh belum sepenuhnya menggambarkan peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat di Desa Kuala Bubon, guna melengkapi keterbatasan pada dokumentasi maka alangkah baiknya pendekatan selanjutnya disarankan untuk

menggunakan pendekatan *Mixed method* atau *Research & Development* agar data yang diperoleh lebih mendalam dan terukur pada penelitian selanjutnya.

Referensi

- Adellia, Siregar, K. N., & Juliantri, Y. (2024). Analisis Kebijakan Bagian Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Kepri. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.171>
- Amin, S. M. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pada Objek Wisata Kuala Bubon Aceh Barat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.73>
- Ardiyanti, D. (2018). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia : Tantangan dan Peluang Keamanan dan Ekonoi Era Jokowi. *Resolusi*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i2.290>
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asropi, Hartono, E. D., & Handoko, Y. (2019). Implementasi Pembangunan Maritim Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Of Public Policy Applied Administration*. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/138>
- Azis, M. V. N. Al. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VII(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Bahua, M. I. (2015). *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia*. Ideas Publishing.
- Djahmiq, N. I., & Salahudin. (2022). Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa. *JiIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiip.v%vi%i.13486>
- Febriyanto, E., Swasanti, I., & Mustaana. (2024). Pemberdayaan Remaja Melalui Pelatihan Menjahit di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.839>
- Giawa, F., & Darmansyah, D. (2022). Evaluasi Tingkat Kepuasan Terhadap Program Pendampingan Nelayan Di Desa Kuala Bubon Kabupaten Aceh Barat. *MAHATANI*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.52434/mja.v5i1.1593>
- Handini, S., Sukei, & Astuti, H. K. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir Pantai*.
- Hasnita, A., & Athaillah, T. (2022). Pemanfaatan Alat Tangkap Ikan dari Rumpon Pada Nelayan di Desa Kuala Bubon. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.309>
- Hayat, S., & Bunyamin, S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dengan Menerapkan Metode Pra (Participatory Rural Appraisal) melalui Aspek Teknologi , Sosial dan Keagamaan Community Empowerment by Applying the Pra (Participatory Rural Appraisal) Method through Technological , Social and Rel. Desember*.
- Husna, F. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa*. Pustaka Pelajar.
- Kandati, F., Mantiri, M., & Monintja, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Siau Barat Selatang Kampung Batusenggo (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang). *EKSKUTIF : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1-8.

- Mannayong, J., Rizal, M., Herling, & Faisal, M. (2024). Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1).
- Mardikanto. (2017). *Pengelolaan Sumber Daya Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Press.
- Meilia, Y., & Safrida, S. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2191–2200. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1029>
- Mishra, B. K., & Sharma, R. K. (2019). *Optimization in Economics : Method and Applications*. Routledge.
- Musthofa, A., Lukito, C., & Suhindarno, H. (2024). Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. *JIAN- Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 58–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jian.v8i2.884>
- Nuraini, S. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di kecamatan biringbulu kabupaten gowa. IV(1), 66–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>
- Rahmanto, D., & Purwaningsih, E. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kemandirian Nelayan. *Jurnal Hukum*, 7(1), 112–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.335>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95.
- Rohman. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Desa : Peluang dan Tantangan Pemerintah Desa*. Universitas Negeri Malang Press.
- Schein, E. (2018). *Organizational Culture and Leadreship*. Jossey Bass.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sulaiman. (2018). *Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan publik*. Alfabeta.
- Sutrisno, H. (2018). *Ekonomi Pesisir : Peluang dan Tantangan untuk pembangunan berkelanjutan*. Alfabeta.
- Widianto, A. (2016). *Pembangunan Ekonomi Pesisir dan peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Yusuf, M. (2017). *Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi dalam Perspektif Pembangunan*. Penerbit Andi.